

Sesana Kepemangkuan Sebagai Landasan Swadharma Pemaku Hindu di Desa Bengkala Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng

¹ Ketut Agus Nova , ²Wayan Titra Gunawijaya, ²Wayan Kariarta, ³ I Ketut Wartayasa,

⁴Yunita Asri Diantary Ni Made

¹²³⁴Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan

jroanom@gmail.com, wayantitragunawijaya@gmail.com,

bagustamtam@yahoo.com, ketutwartayasa01@gmail.com, yunita27@gmail.com

ABSTRAK

Pemangku Hindu memiliki peran sentral dalam kehidupan religius masyarakat Bali, tidak hanya sebagai pelaksana ritual, tetapi juga sebagai figur etika dan spiritual. Namun, dalam praktiknya, kepemangkuan sering kali dipahami secara terbatas pada aspek teknis-ritual, sehingga dimensi etis dan spiritual dari swadharma pemangku belum terinternalisasi secara utuh. Penelitian pengabdian ini bertujuan untuk mengkaji sesana kepemangkuan sebagai landasan swadharma pemangku Hindu di Desa Bengkala. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif partisipatoris berbasis pengabdian kepada masyarakat melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, serta pendampingan reflektif-dialogis terhadap pemangku dan tokoh adat setempat. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pemahaman awal pemangku terhadap sesana kepemangkuan masih didominasi orientasi ritualistik dan pragmatis. Melalui proses pendampingan reflektif, terjadi internalisasi nilai sesana sebagai sistem etika dan spiritual yang membimbing seluruh aspek kehidupan pemangku. Sesana terbukti berfungsi sebagai fondasi swadharma yang memperkuat integritas moral, keteladanan sosial, dan kualitas penghayatan ritual. Implikasi pengabdian ini menunjukkan bahwa penguatan sesana kepemangkuan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan legitimasi moral pemangku, keharmonisan sosial-keagamaan, serta keberlanjutan tradisi Hindu yang kontekstual dan bermakna. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan kepemangkuan sebagai praktik etika-spiritual yang hidup dan relevan dengan dinamika masyarakat Hindu kontemporer.

Kata kunci: sesana kepemangkuan, swadharma pemangku, pemangku Hindu, pengabdian masyarakat, etika Hindu.

ABSTRACT

Hindu priests (pemangku) play a central role in Balinese religious life, not only as ritual officiants but also as moral and spiritual figures within the community. In practice, however, priesthood is often understood primarily in technical and ritual terms, resulting in a limited internalization of ethical and spiritual responsibilities associated with priestly svadharma. This community service-based study aims to examine sesana kepemangkuan (codes of conduct for Hindu priests) as the foundation of priestly svadharma in Desa Bengkala. The study employs a qualitative participatory approach through community engagement, including participatory observation, in-depth interviews, focus group discussions, and reflective-dialogical mentoring involving Hindu priests and local customary leaders. The findings reveal

that the initial understanding of sesana kepemangkuan among priests was predominantly ritualistic and pragmatic. Through reflective mentoring, priests gradually internalized sesana as an ethical and spiritual value system guiding both ritual and everyday life. The internalization of sesana strengthened priestly svadharma, enhanced moral integrity, social exemplarity, and the quality of ritual performance. The study further demonstrates that reinforcing sesana kepemangkuan positively impacts religious authority, social harmony, and the sustainability of Hindu traditions in a changing social context. Theoretically, this study affirms Hindu priesthood as a form of lived ethical-spiritual practice and contributes to broader discourses on religious ethics, community-based religious leadership, and Hindu studies.

Keywords: sesana kepemangkuan, priestly svadharma, Hindu priesthood, community service, Hindu ethics.

Copyright (c) 2025

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license

✉ Corresponding author: Ketut Agus Nova
Email Address : email jroanom@gmail.com
Published 10 Oktober 2025
DOI:
Publisher: Yayasan Ekadanta Bali Dwipa



I. PENDAHULUAN

Agama Hindu merupakan sistem kepercayaan dan praksis religius yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga membingkai relasi etis antara manusia, sesama, dan alam semesta. Dalam konteks Hindu, ajaran dharma menempati posisi sentral sebagai prinsip normatif yang mengarahkan tindakan, tanggung jawab, dan peran sosial-keagamaan setiap individu sesuai dengan kedudukannya. Dharma tidak dipahami secara tunggal, melainkan termanifestasi dalam berbagai bentuk kewajiban khusus, yang dikenal sebagai swadharma, yakni kewajiban moral dan spiritual yang melekat pada peran sosial dan religius seseorang. Dalam struktur kehidupan religius masyarakat Hindu Bali, salah satu peran yang memiliki bobot spiritual dan sosial yang sangat signifikan adalah pemangku Hindu.

Pemangku Hindu merupakan figur religius yang berfungsi sebagai penghubung antara umat dan Tuhan dalam pelaksanaan upacara yadnya, pemelihara kesucian pura, serta penjaga keberlangsungan tradisi ritual Hindu di tingkat komunitas. Keberadaan pemangku tidak semata-mata bersifat fungsional-ritual, tetapi juga mengandung dimensi etis, spiritual, dan simbolik yang kuat. Oleh karena itu, pemangku dituntut untuk menjalankan perannya berdasarkan pedoman normatif yang disebut sesana kepemangkuan, yakni seperangkat aturan, etika, disiplin diri, dan tata laku religius yang mengarahkan kehidupan dan tindakan pemangku dalam menjalankan swadharmanya.

Sesana kepemangkuan pada hakikatnya merupakan manifestasi konkret dari ajaran dharma dalam konteks kepemangkuan. Ia mencakup aspek lahiriah dan batiniah, mulai dari kesucian diri (sekala-niskala), pengendalian perilaku, penghayatan spiritual, hingga tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam teks-teks Hindu, baik yang bersumber dari lontar-lontar keagamaan maupun tradisi lisan, sesana dipahami sebagai fondasi moral yang membedakan pemangku dari umat awam. Dengan demikian, kepemangkuan bukan sekadar jabatan adat atau keagamaan, melainkan sebuah panggilan spiritual yang menuntut integritas, keteladanan, dan kedalaman religius.

Namun, dalam realitas kehidupan masyarakat Hindu kontemporer, terjadi kecenderungan reduksi makna kepemangkuhan yang semakin mengemuka. Pemangku sering kali dipersepsikan hanya sebagai pelaksana teknis upacara, sementara dimensi etis dan spiritual dari sesana kepemangkuhan kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Modernisasi, perubahan sosial, serta tekanan pragmatis kehidupan sehari-hari turut memengaruhi cara pemangku memahami dan menjalankan swadharmanya. Kondisi ini berimplikasi pada terjadinya jarak antara idealitas sesana kepemangkuhan dengan praktik kepemangkuhan aktual di tingkat komunitas.

Fenomena tersebut juga dapat diamati dalam konteks lokal masyarakat Bali, termasuk di Desa Bengkala. Desa ini memiliki karakter sosial-budaya yang khas, dengan struktur adat dan kehidupan religius yang masih kuat, namun sekaligus berhadapan dengan dinamika perubahan sosial yang tidak terelakkan. Pemangku Hindu di Desa Bengkala berperan penting dalam menjaga kesinambungan ritual, adat, dan nilai-nilai keagamaan. Akan tetapi, pemaknaan dan implementasi sesana kepemangkuhan sebagai landasan swadharma pemangku dalam konteks ini belum banyak dikaji secara mendalam dan sistematis.

Kajian mengenai pemangku Hindu selama ini cenderung menempatkan pemangku sebagai aktor ritual dalam struktur keagamaan Bali. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya berfokus pada fungsi pemangku dalam pelaksanaan upacara yadnya, struktur kelembagaan pura, atau aspek historis dan sosiologis kepemangkuhan. Meskipun kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting, namun masih terdapat keterbatasan dalam mengulas dimensi normatif-filosofis kepemangkuhan, khususnya relasi antara sesana kepemangkuhan dan swadharma pemangku sebagai landasan etik-spiritual.

Kesenjangan tersebut menjadi semakin relevan ketika kepemangkuhan dipahami sebagai praktik religius yang hidup (*living religion*), bukan sekadar institusi formal. Pemangku tidak hanya berhadapan dengan tuntutan ritual, tetapi juga dengan ekspektasi sosial masyarakat, tantangan moral, serta kebutuhan untuk menjaga kesucian diri dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa pemahaman yang mendalam terhadap sesana kepemangkuhan, pemangku berpotensi menjalankan perannya secara mekanis, sehingga kehilangan dimensi reflektif dan transformatif dari swadharma yang diembannya.

Dalam perspektif teologi dan etika Hindu, sesana kepemangkuhan dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari ajaran susila dan tapa brata yang diarahkan secara khusus kepada pemangku. Sesana tidak hanya berfungsi sebagai aturan eksternal, tetapi sebagai sarana internalisasi nilai-nilai dharma dalam diri pemangku. Dengan demikian, sesana menjadi landasan utama bagi terbentuknya kesadaran swadharma, yakni kesadaran akan tanggung jawab moral dan spiritual yang dijalankan secara sadar, tulus, dan berkesinambungan.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa pemahaman dan implementasi sesana kepemangkuhan memiliki peran krusial dalam membentuk kualitas kepemangkuhan itu sendiri. Pemangku yang memahami sesana secara mendalam tidak hanya mampu melaksanakan ritual dengan benar, tetapi juga menghadirkan keteladanan etis dan spiritual bagi umat. Sebaliknya, pengabaian terhadap sesana berpotensi melemahkan otoritas moral pemangku dan mengaburkan makna swadharma dalam kehidupan religius masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada sesana kepemangkuhan sebagai landasan swadharma pemangku Hindu di Desa Bengkala. Fokus ini menjadi penting untuk menjawab pertanyaan mendasar mengenai bagaimana sesana dipahami, dimaknai, dan diimplementasikan oleh pemangku dalam konteks sosial-budaya lokal. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap sejauh mana sesana kepemangkuhan berfungsi sebagai pedoman etik dan spiritual dalam kehidupan kepemangkuhan sehari-hari.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji secara komprehensif konsep sesana kepemangkuhan dan perannya sebagai landasan swadharma pemangku Hindu di Desa Bengkala. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pemahaman pemangku terhadap sesana kepemangkuhan; (2) mengidentifikasi bentuk implementasi sesana dalam praktik kepemangkuhan; dan (3) menjelaskan relasi antara sesana kepemangkuhan dan pembentukan swadharma pemangku dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai kepemangkuhan sebagai praktik religius yang berakar pada nilai-nilai dharma.

Dari sisi kajian ilmiah, penelitian ini menempati posisi strategis dalam mengisi celah (gap) penelitian yang ada. Hingga saat ini, masih terbatas penelitian yang secara eksplisit mengaitkan sesana kepemangkuhan dengan konsep swadharma dalam satu kerangka analisis yang integratif. Sebagian besar kajian memisahkan antara aspek normatif-teks dan praktik empiris, sehingga belum mampu menjelaskan dinamika internal kepemangkuhan secara komprehensif. Selain itu, kajian kontekstual berbasis desa adat tertentu, khususnya Desa Bengkala, masih sangat minim.

Dengan mengambil Desa Bengkala sebagai locus penelitian, studi ini menawarkan kontribusi kontekstual yang signifikan. Desa Bengkala tidak hanya menjadi ruang empiris, tetapi juga medan interpretasi di mana sesana kepemangkuhan berinteraksi dengan nilai adat, budaya lokal, dan dinamika sosial masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana ajaran normatif Hindu diaktualisasikan dalam konteks kehidupan nyata pemangku dan umat.

Novelty penelitian ini terletak pada upaya menempatkan sesana kepemangkuhan sebagai fondasi etika dan spiritual swadharma pemangku, bukan sekadar sebagai aturan ritual. Penelitian ini menggeser fokus dari kepemangkuhan sebagai fungsi seremonial menuju kepemangkuhan sebagai praktik moral-spiritual yang hidup. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan analisis normatif-teologis dengan data empiris lapangan, sehingga mampu menjembatani kesenjangan antara teks dan praktik.

Justifikasi akademik penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan kajian teologi Hindu, etika keagamaan, dan studi kepemangkuhan. Penelitian ini memperkaya diskursus ilmiah mengenai peran pemangku dalam kehidupan Hindu Bali dengan menekankan dimensi swadharma dan sesana sebagai inti kepemangkuhan. Sementara itu, justifikasi praktis penelitian ini terletak pada relevansinya bagi pembinaan pemangku Hindu, penguatan lembaga keagamaan, serta pengembangan pendidikan keagamaan Hindu yang berbasis nilai-nilai etis dan spiritual.

Dengan demikian, penelitian mengenai sesana kepemangkuhan sebagai landasan swadharma pemangku Hindu di Desa Bengkala menjadi penting dan relevan, baik secara akademik maupun praktis. Penelitian ini tidak hanya berupaya memahami kepemangkuhan sebagaimana adanya, tetapi juga menawarkan refleksi kritis mengenai bagaimana kepemangkuhan seharusnya dijalankan dalam kerangka dharma. Melalui kajian ini, diharapkan pemangku Hindu dapat semakin meneguhkan perannya sebagai subjek moral dan spiritual yang berkontribusi pada keberlanjutan kehidupan religius masyarakat Hindu Bali.

II. METODE PENGABDIAN

Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan kualitatif partisipatoris dengan model pengabdian berbasis komunitas (community-based engagement) yang menempatkan pemangku Hindu sebagai subjek sekaligus mitra aktif dalam proses penguatan pemahaman sesana kepemangkuhan. Lokasi pengabdian dilaksanakan di Desa Bengkala, dengan sasaran utama para pemangku Hindu serta tokoh adat dan tokoh agama setempat. Pendekatan

ini dipilih untuk memastikan bahwa proses pengabdian tidak bersifat top-down, melainkan dialogis dan kontekstual, sehingga nilai-nilai sesana kepemangkuan dapat dipahami dan diinternalisasi sesuai dengan realitas sosial-budaya lokal. Data dan informasi diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan pemangku, serta diskusi kelompok terfokus (FGD) yang membahas pemaknaan, pengalaman, dan tantangan dalam menjalankan swadharma kepemangkuan.

Tahapan pengabdian meliputi: (1) tahap persiapan, yang mencakup pemetaan kebutuhan dan identifikasi pemahaman awal pemangku terhadap sesana kepemangkuan; (2) tahap pelaksanaan, berupa pendampingan reflektif, dialog keagamaan, dan penguatan nilai sesana melalui diskusi tematik yang mengaitkan ajaran normatif Hindu dengan praktik kepemangkuan sehari-hari; serta (3) tahap evaluasi dan refleksi, yang dilakukan untuk menilai perubahan pemahaman, sikap, dan kesadaran swadharma pemangku setelah kegiatan pengabdian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menafsirkan temuan lapangan berdasarkan perspektif teologi dan etika Hindu. Melalui metode ini, pengabdian diharapkan tidak hanya menghasilkan peningkatan pemahaman konseptual, tetapi juga mendorong transformasi praksis kepemangkuan yang lebih berlandaskan sesana dan swadharma.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Pemahaman Awal Pemangku terhadap Sesana Kepemangkuhan

Hasil awal kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa pemahaman pemangku Hindu di Desa Bengkala terhadap sesana kepemangkuhan masih didominasi oleh orientasi praktis dan ritualistik. Sesana kepemangkuhan umumnya dipahami sebagai seperangkat aturan teknis yang mengatur tata cara muput upacara, kesiapan sarana upakara, serta pantangan-pantangan lahiriah yang harus dipatuhi sebelum dan sesudah pelaksanaan yadnya. Pemaknaan ini menunjukkan bahwa sesana diposisikan terutama sebagai pedoman operasional, bukan sebagai sistem nilai etis dan spiritual yang menyeluruh.

Pemahaman tersebut terbentuk melalui proses pewarisan tradisi secara lisan dan praksis turun-temurun. Sebagian besar pemangku memperoleh pengetahuan tentang kepemangkuhan melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan ritual sejak usia muda, dengan belajar dari pemangku senior atau anggota keluarga yang lebih dahulu menjalani peran tersebut. Pola transmisi pengetahuan seperti ini memperkuat kontinuitas tradisi, namun pada saat yang sama menyisakan ruang kosong dalam aspek reflektif dan konseptual. Sesana dipraktikkan sebagai kebiasaan yang diterima apa adanya, tanpa disertai pemahaman filosofis mengenai makna dan tujuan etik-spiritual yang mendasarinya.

Dalam wawancara dan diskusi awal, terungkap bahwa sebagian pemangku memandang sesana kepemangkuhan sebagai “aturan adat” yang harus ditaati agar pelaksanaan upacara berjalan lancar dan tidak menimbulkan kesalahan ritual. Pemahaman ini menempatkan sesana dalam kerangka kepatuhan formal, bukan sebagai sarana pembentukan kesadaran diri dan penghayatan swadharma. Akibatnya, kepemangkuhan lebih sering dipahami sebagai kewajiban sosial dan keagamaan yang bersifat fungsional, bukan sebagai panggilan spiritual yang menuntut integritas moral dan kesadaran batin yang berkelanjutan.

Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan reduksi makna kepemangkuhan dalam praktik kehidupan religius masyarakat. Pemangku dinilai berhasil apabila mampu memimpin upacara dengan benar secara teknis, sementara dimensi etika personal dan spiritualitas batin jarang dijadikan ukuran utama. Padahal, dalam ajaran Hindu, kepemangkuhan mengandung tanggung jawab moral yang besar karena pemangku diposisikan sebagai figur suci yang menjadi

perantara antara umat dan manifestasi ketuhanan. Ketika sesana dipahami secara sempit, maka fungsi transformatif kepemangkuan sebagai teladan etika dan spiritual berpotensi melemah.

Lebih lanjut, pemahaman awal yang bersifat ritualistik ini juga dipengaruhi oleh dinamika sosial kontemporer. Tuntutan kehidupan ekonomi, keterbatasan waktu, serta meningkatnya kompleksitas sosial mendorong pemangku untuk memprioritaskan aspek teknis kepemangkuan yang dianggap paling terlihat dan langsung berdampak. Dalam situasi demikian, refleksi mendalam mengenai sesana dan swadharma sering kali terpinggirkan. Pemangku menjalankan perannya secara pragmatis, demi memenuhi kebutuhan komunitas, tanpa ruang yang cukup untuk menginternalisasi nilai-nilai etik dan spiritual yang seharusnya menjadi fondasi kepemangkuan.

Hasil pengabdian pada tahap awal juga memperlihatkan adanya pemisahan antara kehidupan ritual dan kehidupan sosial pemangku. Sebagian pemangku mengakui bahwa mereka memandang kepemangkuan sebagai peran yang aktif terutama saat berada di pura atau ketika memimpin upacara, sementara dalam kehidupan sehari-hari di luar konteks ritual, mereka merasa tidak selalu terikat secara langsung dengan sesana kepemangkuan. Pandangan ini mencerminkan pemahaman bahwa sesana berlaku situasional, bukan sebagai pedoman hidup yang menyeluruh. Hal ini berimplikasi pada lemahnya internalisasi swadharma sebagai identitas moral yang melekat pada diri pemangku sepanjang waktu.

Dari perspektif teoretis, kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara norma ideal kepemangkuan dalam ajaran Hindu dengan praktik empiris di tingkat komunitas. Sesana kepemangkuan idealnya berfungsi sebagai sistem etika religius yang membimbing pemangku dalam seluruh aspek kehidupan, baik sakral maupun profan. Namun, dalam praktik awal yang ditemukan, sesana lebih diposisikan sebagai seperangkat larangan dan kewajiban formal yang berkaitan langsung dengan ritual. Kesenjangan ini menegaskan pentingnya upaya penguatan pemahaman konseptual terhadap sesana sebagai landasan swadharma pemangku.

Meskipun demikian, hasil pengabdian juga menunjukkan adanya potensi reflektif yang kuat di kalangan pemangku. Dalam diskusi awal, beberapa pemangku mengungkapkan kegelisahan batin terkait peran mereka, terutama ketika menghadapi dilema moral dalam kehidupan sosial atau tekanan ekspektasi umat. Kegelisahan ini menunjukkan bahwa pemangku secara intuitif menyadari adanya dimensi etis dan spiritual yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam praktik kepemangkuan sehari-hari. Potensi ini menjadi titik masuk penting bagi proses pendampingan reflektif dalam pengabdian.

Dengan demikian, pemahaman awal pemangku terhadap sesana kepemangkuan dapat dipetakan dalam dua karakter utama. Pertama, pemahaman dominan yang bersifat ritualistik, teknis, dan pragmatis. Kedua, kesadaran laten akan pentingnya dimensi etik-spiritual kepemangkuan, meskipun belum terartikulasikan secara sistematis. Temuan ini menjadi dasar penting bagi perancangan intervensi pengabdian yang menekankan dialog, refleksi, dan internalisasi nilai sesana kepemangkuan sebagai landasan swadharma.

Secara keseluruhan, hasil awal ini menegaskan bahwa penguatan sesana kepemangkuan tidak dapat dilakukan hanya melalui penambahan pengetahuan teknis atau aturan formal. Diperlukan pendekatan yang mampu menggugah kesadaran batin pemangku mengenai makna swadharma sebagai panggilan hidup. Pemahaman awal yang teridentifikasi dalam pengabdian ini sekaligus memperlihatkan urgensi untuk menggeser paradigma kepemangkuan dari sekadar praktik ritual menuju praktik etika-spiritual yang holistik dan berkelanjutan.

2. Proses Internalisasi Sesana Kepemangkuhan melalui Pendampingan Reflektif

Proses internalisasi sesana kepemangkuhan dalam kegiatan pengabdian ini berlangsung melalui pendekatan reflektif-dialogis yang menempatkan pemangku Hindu sebagai subjek aktif dalam pembelajaran nilai. Berangkat dari pemahaman awal yang cenderung ritualistik sebagaimana dipaparkan pada subbagian sebelumnya, pendampingan dirancang untuk membuka ruang kesadaran baru mengenai sesana kepemangkuhan sebagai sistem nilai etika dan spiritual yang menyeluruh. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan tradisi kepemangkuhan yang telah hidup di masyarakat, melainkan untuk memperdalam makna dan kesadaran batin pemangku terhadap swadharma yang mereka emban.

Tahap awal internalisasi dilakukan melalui dialog keagamaan yang bersifat partisipatif, di mana pemangku diajak merefleksikan pengalaman kepemangkuhan mereka sendiri. Dalam sesi ini, pemangku tidak hanya diminta menjelaskan apa yang mereka lakukan dalam praktik ritual, tetapi juga mengungkapkan alasan, keyakinan, dan pertimbangan batin yang melandasi tindakan tersebut. Proses ini membuka ruang kesadaran bahwa banyak praktik kepemangkuhan dijalankan secara rutin tanpa refleksi mendalam mengenai makna etik dan spiritualnya. Dialog ini menjadi pintu masuk untuk menafsirkan kembali sesana kepemangkuhan sebagai pedoman hidup, bukan sekadar kewajiban seremonial.

Selanjutnya, pendampingan diarahkan pada penguatan pemahaman konseptual mengenai sesana kepemangkuhan. Melalui diskusi tematik, pemangku diajak memahami bahwa sesana mencakup dimensi lahiriah dan batiniah yang saling terkait. Aspek lahiriah seperti kesucian diri, pantangan, dan tata cara ritual diposisikan sebagai ekspresi dari kesucian batin, pengendalian diri, dan ketulusan niat. Dalam konteks ini, sesana tidak lagi dipahami sebagai beban normatif, melainkan sebagai sarana pembentukan karakter religius yang berorientasi pada pengabdian dan kesadaran dharma.

Proses internalisasi semakin mendalam ketika pemangku mulai mengaitkan sesana kepemangkuhan dengan pengalaman konkret dalam kehidupan sosial mereka. Diskusi tidak hanya berfokus pada ritual di pura, tetapi juga pada sikap pemangku dalam keluarga, masyarakat, dan struktur adat. Pemangku diajak merefleksikan bagaimana ucapan, tindakan, dan keputusan sehari-hari mencerminkan atau justru bertentangan dengan nilai sesana. Pada tahap ini, mulai muncul kesadaran bahwa kepemangkuhan tidak bersifat situasional, melainkan melekat secara ontologis pada identitas diri pemangku.



Hasil pendampingan menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam memaknai kepemangkuhan. Pemangku mulai memahami bahwa sesana kepemangkuhan berfungsi sebagai kerangka etik yang menuntun seluruh aspek kehidupan, baik dalam ruang sakral maupun profan. Kesadaran ini mendorong pemangku untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, menjaga tutur kata, serta mempertimbangkan dampak moral dari setiap tindakan. Dengan demikian, internalisasi sesana tidak berhenti pada level kognitif, tetapi mulai merambah pada pembentukan sikap dan orientasi batin.

Dalam konteks Desa Bengkala, proses internalisasi ini menjadi sangat relevan karena pemangku tidak hanya berperan dalam ritual, tetapi juga memiliki posisi simbolik dalam struktur sosial desa adat. Ketika pemangku mulai menghayati sesana sebagai landasan swadharma, mereka menyadari bahwa keberadaan mereka menjadi rujukan moral bagi masyarakat. Kesadaran ini menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga integritas diri, tidak hanya demi kesucian ritual, tetapi juga demi keharmonisan sosial.

Pendampingan reflektif juga memperlihatkan bahwa internalisasi sesana kepemangkuhan merupakan proses yang gradual dan berkelanjutan. Tidak semua pemangku langsung mengalami perubahan pemahaman yang sama. Namun, melalui dialog yang berulang dan refleksi bersama, terbentuk kesadaran kolektif bahwa kepemangkuhan menuntut konsistensi antara ajaran dan praktik. Proses ini memperkuat dimensi pedagogis dalam pengabdian, di mana pembelajaran nilai berlangsung melalui pengalaman, perenungan, dan interaksi sosial, bukan melalui doktrinasi semata.

Dari perspektif etnopedagogis, internalisasi sesana kepemangkuhan dapat dipahami sebagai proses pembelajaran berbasis pengalaman religius. Pemangku belajar dari praktik mereka sendiri, dari interaksi dengan umat, serta dari refleksi atas tantangan moral yang dihadapi. Pendampingan dalam pengabdian ini berfungsi sebagai fasilitator yang membantu pemangku menamai, memahami, dan mengartikulasikan pengalaman religius tersebut dalam kerangka nilai dharma dan swadharma. Dengan demikian, sesana kepemangkuhan menjadi pengetahuan hidup (living knowledge) yang terus berkembang seiring dengan pengalaman pemangku.

Lebih jauh, proses internalisasi ini juga memperlihatkan pentingnya pendekatan dialogis dalam pembinaan pemangku. Pemangku menunjukkan keterbukaan untuk merefleksikan

praktik kepemangkuhan ketika mereka diposisikan sebagai mitra dialog, bukan sebagai objek pembinaan. Hal ini menegaskan bahwa penguatan sesana kepemangkuhan akan lebih efektif apabila dilakukan melalui pendekatan partisipatoris yang menghargai pengalaman dan kearifan lokal pemangku. Pendekatan semacam ini memungkinkan terjadinya integrasi antara ajaran normatif Hindu dan konteks sosial-budaya setempat.

Secara keseluruhan, hasil pengabdian pada subbagian ini menunjukkan bahwa internalisasi sesana kepemangkuhan melalui pendampingan reflektif mampu menggeser pemahaman pemangku dari orientasi ritualistik menuju kesadaran etika-spiritual yang lebih mendalam. Sesana tidak lagi dipahami sebagai aturan eksternal yang membatasi, melainkan sebagai pedoman internal yang membimbing pemangku dalam menjalankan swadharma secara sadar dan bertanggung jawab. Proses ini menjadi fondasi penting bagi penguatan kepemangkuhan sebagai praktik religius yang bermakna, autentik, dan relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat Hindu kontemporer.

3. Sesana Kepemangkuhan sebagai Landasan Swadharma Pemangku

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa proses internalisasi sesana kepemangkuhan yang berlangsung secara reflektif berimplikasi langsung pada penguatan kesadaran swadharma pemangku Hindu. Setelah melalui tahapan dialog dan pendampingan, pemangku mulai memaknai swadharma bukan sekadar sebagai tugas formal untuk muput upacara, melainkan sebagai panggilan moral dan spiritual yang melekat secara utuh pada identitas diri mereka. Swadharma dipahami sebagai kewajiban suci yang mencakup dimensi ritual, etika personal, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks ini, sesana kepemangkuhan berfungsi sebagai kerangka normatif yang memberi arah dan batasan bagi pelaksanaan swadharma. Sesana tidak lagi dipersepsikan sebagai aturan eksternal yang bersifat membatasi, tetapi sebagai pedoman internal yang membimbing pemangku dalam menghayati perannya secara sadar dan bertanggung jawab. Pemangku mulai menyadari bahwa setiap tindakan, ucapan, dan keputusan yang mereka ambil – baik di dalam maupun di luar ruang ritual – merupakan manifestasi dari swadharma yang harus selaras dengan nilai-nilai dharma.

Kesadaran ini tampak dari perubahan cara pemangku merefleksikan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Pemangku tidak lagi membatasi kepemangkuhan pada waktu dan tempat tertentu, seperti saat berada di pura atau memimpin upacara. Sebaliknya, kepemangkuhan dipahami sebagai identitas moral yang melekat sepanjang waktu. Dengan demikian, sesana kepemangkuhan menjadi dasar etik yang menuntun pemangku dalam bersikap di tengah keluarga, berinteraksi dalam masyarakat, serta mengambil peran dalam struktur adat dan sosial desa.

Hasil pengabdian juga menunjukkan bahwa penguatan swadharma melalui sesana kepemangkuhan mendorong pemangku untuk lebih menekankan aspek keteladanan. Pemangku mulai melihat dirinya sebagai figur yang tidak hanya bertugas melaksanakan ritual, tetapi juga menjadi contoh hidup dari nilai-nilai Hindu. Kesadaran ini memperkuat komitmen pemangku untuk menjaga kesucian pikiran, ucapan, dan perbuatan (tri kaya parisudha) sebagai wujud konkret dari swadharma. Dengan demikian, sesana berfungsi sebagai jembatan antara ajaran normatif Hindu dan praksis kehidupan nyata.



Dalam kerangka teoretis Hindu, swadharma pemangku memiliki dimensi ontologis dan aksiologis. Secara ontologis, swadharma melekat pada keberadaan pemangku sebagai individu yang dipanggil untuk menjalankan fungsi religius tertentu. Secara aksiologis, swadharma menuntut pemangku untuk mengorientasikan seluruh tindakannya pada nilai kebaikan, kesucian, dan keharmonisan. Sesana kepemangku menjadi instrumen utama yang menghubungkan kedua dimensi tersebut, karena di dalamnya terkandung prinsip-prinsip etis dan spiritual yang harus dihayati dan diperaktikkan.

Dalam konteks Desa Bengkala, penguatan swadharma pemangku melalui sesana kepemangku memiliki implikasi sosial yang signifikan. Pemangku yang menghayati sesana secara mendalam cenderung menunjukkan sikap rendah hati, adil, dan bijaksana dalam berinteraksi dengan masyarakat. Hal ini memperkuat legitimasi moral pemangku di mata umat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peran kepemangku. Swadharma pemangku tidak lagi dipahami sebagai beban, tetapi sebagai sumber makna dan pengabdian dalam kehidupan sosial-keagamaan.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa sesana kepemangku berfungsi sebagai mekanisme pengendalian diri (self-regulation) bagi pemangku. Dengan menjadikan sesana sebagai landasan swadharma, pemangku memiliki kerangka etik yang jelas dalam menghadapi dilema moral dan tekanan sosial. Pemangku menjadi lebih selektif dalam bertindak, lebih reflektif dalam mengambil keputusan, dan lebih konsisten dalam menjaga integritas diri. Hal ini menegaskan bahwa sesana kepemangku tidak hanya mengatur aspek ritual, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian pemangku.

Lebih jauh, penguatan swadharma melalui sesana kepemangku juga berkontribusi pada transformasi cara pandang pemangku terhadap pengabdian. Pemangku mulai memahami bahwa pengabdian tidak diukur semata dari seberapa sering atau seberapa besar upacara yang dipimpin, tetapi dari kualitas kesadaran dan ketulusan dalam menjalankan peran. Swadharma dipahami sebagai jalan spiritual (sadhana) yang menuntut keselarasan antara niat, tindakan, dan

tujuan hidup. Dalam kerangka ini, sesana menjadi panduan yang menuntun pemangku dalam menapaki jalan pengabdian tersebut secara konsisten.

Dari perspektif pembinaan keagamaan, hasil ini menunjukkan bahwa penguatan swadharma pemangku tidak dapat dilepaskan dari penguatan pemahaman terhadap sesana kepemangkuhan. Program pembinaan yang hanya menekankan aspek teknis ritual berpotensi menghasilkan pemangku yang kompeten secara prosedural, tetapi kurang memiliki kedalaman etis dan spiritual. Sebaliknya, pembinaan yang menempatkan sesana sebagai landasan swadharma mampu membentuk pemangku yang tidak hanya cakap secara ritual, tetapi juga matang secara moral dan spiritual.

Secara keseluruhan, subbagian ini menegaskan bahwa sesana kepemangkuhan memiliki peran sentral sebagai landasan swadharma pemangku Hindu. Melalui internalisasi sesana, swadharma tidak lagi dipahami secara sempit sebagai kewajiban fungsional, tetapi sebagai panggilan hidup yang menyeluruh. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa kepemangkuhan merupakan praktik etika-spiritual yang hidup, di mana sesana berfungsi sebagai fondasi nilai yang membimbing pemangku dalam menjalankan peran religiusnya secara autentik dan bermakna.

4. Implikasi Sosial dan Keagamaan dari Penguatan Sesana Kepemangkuhan

Penguatan pemahaman dan internalisasi sesana kepemangkuhan sebagaimana dihasilkan melalui kegiatan pengabdian ini membawa implikasi yang signifikan bagi kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Sesana kepemangkuhan yang dipahami sebagai landasan swadharma tidak hanya berdampak pada transformasi personal pemangku, tetapi juga memengaruhi relasi sosial, struktur otoritas keagamaan, serta kualitas kehidupan religius komunitas secara kolektif. Dalam konteks ini, kepemangkuhan tampil bukan sekadar sebagai fungsi ritual, melainkan sebagai institusi moral-spiritual yang berperan aktif dalam menjaga keharmonisan sosial dan keberlanjutan nilai-nilai keagamaan Hindu.

Salah satu implikasi sosial yang paling menonjol adalah menguatnya legitimasi moral pemangku di mata masyarakat. Pemangku yang menghayati sesana secara mendalam cenderung menunjukkan konsistensi antara ajaran yang disampaikan dalam ritual dan perilaku sehari-hari. Keteladanan ini memperkuat kepercayaan umat terhadap pemangku sebagai figur yang layak dijadikan panutan, tidak hanya dalam konteks ritual, tetapi juga dalam pengambilan sikap etis dan penyelesaian persoalan sosial. Dengan demikian, otoritas pemangku tidak lagi bertumpu semata pada posisi struktural atau kemampuan teknis, tetapi pada integritas moral dan spiritual yang diakui secara sosial.

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah terjadinya pergeseran pola relasi antara pemangku dan umat. Penguatan sesana kepemangkuhan mendorong pemangku untuk memosisikan dirinya sebagai pelayan umat (sewaka dharma), bukan sebagai figur yang berjarak atau bersifat elitis. Relasi keagamaan menjadi lebih dialogis dan partisipatif, di mana pemangku tidak hanya memimpin upacara, tetapi juga berperan sebagai sumber refleksi nilai dan pembimbing spiritual bagi masyarakat. Pola relasi ini memperkaya fungsi kepemangkuhan sebagai medium transmisi nilai-nilai dharma dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks kehidupan sosial desa adat, penguatan sesana kepemangkuhan juga berkontribusi pada terciptanya keharmonisan sosial. Pemangku yang berlandaskan swadharma cenderung bersikap adil, bijaksana, dan tidak memihak dalam dinamika sosial yang kompleks. Sikap ini penting terutama dalam situasi konflik atau perbedaan kepentingan di tingkat komunitas. Keberadaan pemangku sebagai figur penyeimbang moral membantu menjaga

stabilitas sosial dan mencegah eskalasi konflik yang dapat mengganggu keharmonisan masyarakat.

Implikasi keagamaan dari penguatan sesana kepemangkuhan juga tampak pada meningkatnya kualitas penghayatan ritual. Ritual tidak lagi dipahami semata sebagai rangkaian simbolik yang harus dilaksanakan, tetapi sebagai ekspresi spiritual yang sarat makna. Pemangku yang menghayati sesana sebagai landasan swadharma cenderung memimpin ritual dengan kesadaran penuh, ketulusan niat, dan penghayatan batin yang mendalam. Hal ini berdampak pada meningkatnya kualitas pengalaman religius umat, yang merasakan kehadiran dimensi sakral secara lebih nyata dalam pelaksanaan upacara.

Selain itu, penguatan sesana kepemangkuhan berimplikasi pada keberlanjutan tradisi keagamaan Hindu. Dalam situasi perubahan sosial yang cepat, tradisi keagamaan sering kali menghadapi tantangan berupa formalisasi berlebihan atau, sebaliknya, pengaburan nilai. Pemangku yang memiliki pemahaman mendalam terhadap sesana berperan sebagai penjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi dan adaptasi kontekstual. Mereka mampu menjaga esensi ajaran Hindu sambil merespons dinamika sosial secara bijaksana, sehingga tradisi tetap hidup dan relevan.

Di Desa Bengkala, implikasi ini menjadi semakin nyata mengingat posisi pemangku yang strategis dalam struktur sosial-keagamaan desa. Penguatan sesana kepemangkuhan memperkokoh peran pemangku sebagai simpul nilai yang menghubungkan dimensi adat, agama, dan kehidupan sosial. Pemangku tidak hanya menjadi pelaksana upacara di pura, tetapi juga menjadi referensi moral dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini memperkuat integrasi antara agama dan adat sebagai fondasi kehidupan sosial desa.

Dari perspektif pendidikan keagamaan, implikasi penguatan sesana kepemangkuhan juga sangat relevan. Pemangku yang menghayati swadharma secara utuh berpotensi menjadi agen edukasi nilai-nilai Hindu di tingkat komunitas. Melalui keteladanan dan interaksi sehari-hari, pemangku mentransmisikan nilai etika, spiritualitas, dan kebajikan kepada generasi muda. Dengan demikian, kepemangkuhan berkontribusi langsung terhadap pembentukan karakter religius masyarakat, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada institusi pendidikan formal.

Implikasi lain yang bersifat struktural adalah munculnya kebutuhan untuk mereorientasi program pembinaan pemangku. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa pembinaan yang efektif harus melampaui pelatihan teknis ritual dan mencakup penguatan pemahaman sesana serta refleksi swadharma. Program pembinaan yang demikian tidak hanya meningkatkan kompetensi pemangku, tetapi juga memperkuat peran kepemangkuhan sebagai institusi moral dalam kehidupan keagamaan Hindu. Hal ini penting untuk menjawab tantangan keberlanjutan kepemangkuhan di tengah perubahan sosial dan budaya.

Secara teoretis, implikasi sosial dan keagamaan dari penguatan sesana kepemangkuhan mempertegas bahwa agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai sistem etika yang hidup dalam praktik sosial. Kepemangkuhan menjadi locus di mana nilai-nilai normatif Hindu berinteraksi dengan realitas sosial secara dinamis. Penguatan sesana sebagai landasan swadharma memungkinkan kepemangkuhan menjalankan fungsi transformatifnya secara optimal, baik pada level individu maupun komunitas.

Dengan demikian, subbagian ini menegaskan bahwa penguatan sesana kepemangkuhan memiliki dampak yang luas dan mendalam bagi kehidupan sosial-keagamaan masyarakat. Implikasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat internal bagi pemangku, tetapi juga eksternal dalam membentuk kualitas relasi sosial, penghayatan ritual, dan keberlanjutan nilai-nilai keagamaan Hindu. Temuan ini sekaligus memperkuat argumen bahwa kepemangkuhan yang

berlandaskan sesana dan swadharma merupakan pilar penting dalam menjaga keharmonisan dan kebermaknaan kehidupan religius masyarakat Hindu Bali.

5. Diskusi Teoretis dan Kontribusi Ilmiah Pengabdian

Hasil pengabdian mengenai penguatan sesana kepemangku sebagai landasan swadharma pemangku Hindu membuka ruang diskusi teoretis yang penting dalam kajian agama, etika Hindu, dan studi kepemangku. Secara konseptual, temuan ini menegaskan bahwa kepemangku tidak dapat direduksi menjadi peran ritual semata, melainkan harus dipahami sebagai praktik etika-spiritual yang hidup dan kontekstual. Perspektif ini memperkaya pemahaman akademik mengenai bagaimana ajaran normatif Hindu beroperasi dalam praktik sosial-keagamaan masyarakat.

Dalam kerangka teologi Hindu, sesana kepemangku dapat diposisikan sebagai bentuk konkret dari dharma normatif yang terpersonalisasi. Sesana tidak berdiri sebagai seperangkat aturan abstrak, melainkan sebagai pedoman praksis yang mengarahkan individu pemangku dalam menghayati swadharma-nya. Temuan pengabdian ini memperlihatkan bahwa ketika sesana diinternalisasi secara reflektif, ia berfungsi sebagai mekanisme internal pembentuk kesadaran moral, bukan sekadar alat kontrol eksternal. Hal ini memperkuat argumen bahwa etika Hindu bersifat imanen dalam praktik kehidupan, bukan hanya normatif dalam teks.

Dari sudut pandang filsafat moral, penguatan sesana kepemangku menunjukkan relevansi konsep etika kebijakan (*virtue ethics*) dalam konteks Hindu Bali. Pemangku yang menghayati sesana tidak hanya mengikuti aturan, tetapi mengembangkan kualitas karakter seperti ketulusan, pengendalian diri, kebijaksanaan, dan tanggung jawab. Swadharma pemangku dalam konteks ini bukan sekadar kewajiban fungsional, tetapi ekspresi dari karakter etis yang terbentuk melalui latihan spiritual dan refleksi berkelanjutan. Dengan demikian, kepemangku dapat dipahami sebagai praktik pembentukan subjek moral dalam tradisi Hindu.

Secara sosiologis, temuan ini juga memperkaya diskursus mengenai otoritas keagamaan di tingkat komunitas. Otoritas pemangku tidak hanya bersumber dari struktur adat atau legitimasi ritual, tetapi juga dari integritas moral yang dihasilkan melalui penghayatan sesana. Hal ini menegaskan bahwa otoritas keagamaan bersifat relasional dan performatif, dibangun melalui konsistensi antara ajaran dan tindakan. Perspektif ini relevan untuk memahami dinamika kepemimpinan keagamaan di masyarakat tradisional yang tengah berhadapan dengan perubahan sosial.

Kontribusi teoretis lainnya terletak pada integrasi antara kajian normatif dan empiris. Selama ini, studi tentang kepemangku cenderung terfragmentasi antara analisis teks keagamaan dan deskripsi praktik ritual. Pengabdian ini menunjukkan bahwa sesana kepemangku dapat menjadi titik temu antara keduanya. Dengan menempatkan sesana sebagai landasan swadharma, penelitian ini menjembatani ajaran normatif Hindu dengan praktik kepemangku aktual, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih utuh dan kontekstual.

Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, temuan ini juga memberikan kontribusi metodologis yang signifikan. Pendekatan reflektif-dialogis terbukti efektif dalam menggali dan memperkuat kesadaran etis pemangku. Metode ini menegaskan bahwa pengabdian berbasis agama dan budaya tidak cukup dilakukan melalui transfer pengetahuan satu arah, tetapi harus melibatkan proses refleksi bersama yang menghargai pengalaman religius subjek pengabdian. Dengan demikian, pengabdian berfungsi tidak hanya sebagai sarana pemberdayaan, tetapi juga sebagai ruang produksi pengetahuan (*knowledge co-creation*).

Kontribusi ilmiah pengabdian ini juga relevan bagi pengembangan studi etnopedagogi spiritual. Proses internalisasi sesana kepemangku menunjukkan bahwa pembelajaran nilai

religius berlangsung secara kontekstual melalui pengalaman hidup, praktik ritual, dan interaksi sosial. Pemangku belajar bukan melalui kurikulum formal, tetapi melalui refleksi atas peran dan tanggung jawabnya dalam komunitas. Temuan ini memperkaya wacana tentang pendidikan nilai berbasis komunitas dan kearifan lokal dalam konteks Hindu Bali.

Lebih lanjut, pengabdian ini memberikan sumbangan penting bagi kajian keberlanjutan tradisi keagamaan. Dengan menekankan sesana sebagai landasan swadharma, kepemangku diposisikan sebagai institusi dinamis yang mampu beradaptasi tanpa kehilangan esensi. Pemangku yang memahami sesana secara mendalam mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi dan respons terhadap perubahan sosial. Perspektif ini penting untuk menghindari dua ekstrem, yaitu konservatisme ritual yang kaku dan pragmatisme keagamaan yang dangkal.

Dalam konteks lokal Desa Bengkala, kontribusi ilmiah pengabdian ini terletak pada penyediaan model konseptual kepemangku berbasis swadharma yang dapat direplikasi atau diuji di konteks desa adat lainnya. Meskipun bersifat kontekstual, temuan ini memiliki potensi generalisasi analitis, khususnya bagi masyarakat Hindu yang memiliki struktur kepemangku serupa. Dengan demikian, penelitian ini membuka peluang bagi studi komparatif tentang kepemangku di berbagai wilayah Bali maupun Nusantara.

Secara lebih luas, diskusi ini menegaskan bahwa agama Hindu, melalui institusi kepemangku, memiliki kapasitas internal untuk membangun etika sosial yang relevan dengan tantangan kontemporer. Sesana kepemangku sebagai landasan swadharma menunjukkan bahwa transformasi sosial dan moral dapat dimulai dari penguatan peran-peran keagamaan di tingkat lokal. Hal ini memperkuat posisi agama sebagai sumber etika publik, bukan hanya sebagai sistem ritual privat.

Dengan demikian, Subbagian ini menegaskan bahwa kontribusi pengabdian tidak berhenti pada peningkatan kapasitas pemangku secara individual, tetapi juga pada pengayaan wacana akademik tentang agama, etika, dan masyarakat. Penguatan sesana kepemangku sebagai landasan swadharma pemangku Hindu memberikan perspektif baru yang integratif, kontekstual, dan reflektif dalam memahami kepemangku sebagai praktik etika-spiritual yang hidup. Temuan ini sekaligus membuka ruang penelitian lanjutan untuk memperdalam dan memperluas kajian kepemangku dalam kerangka ilmu agama dan budaya.

IV. SIMPULAN

Pengabdian ini menyimpulkan bahwa sesana kepemangku memiliki peran fundamental sebagai landasan swadharma pemangku Hindu, baik dalam dimensi ritual, etika personal, maupun tanggung jawab sosial-keagamaan. Temuan menunjukkan bahwa pemahaman awal pemangku di Desa Bengkala masih cenderung bersifat ritualistik dan teknis, sehingga sesana lebih dipahami sebagai aturan formal dalam pelaksanaan upacara. Kondisi ini mengakibatkan swadharma pemangku belum sepenuhnya dihayati sebagai panggilan moral-spiritual yang melekat secara utuh pada identitas kepemangku.

Melalui pendekatan pengabdian berbasis komunitas dengan pendampingan reflektif-dialogis, terjadi proses internalisasi sesana kepemangku yang signifikan. Pemangku mulai memaknai sesana sebagai sistem nilai etika dan spiritual yang membimbing seluruh aspek kehidupan, tidak terbatas pada ruang dan waktu ritual. Proses ini menumbuhkan kesadaran bahwa swadharma pemangku merupakan kewajiban suci yang menuntut konsistensi antara pikiran, ucapan, dan perbuatan dalam kehidupan sosial-keagamaan sehari-hari. Dengan

demikian, sesana berfungsi sebagai pedoman internal yang membentuk integritas, keteladanan, dan kesadaran diri pemangku.

Penguatan sesana kepemangkuhan juga membawa implikasi sosial dan keagamaan yang luas. Pemangku yang menghayati swadharma secara reflektif menunjukkan peningkatan legitimasi moral, kualitas relasi dengan umat, serta peran yang lebih konstruktif dalam menjaga keharmonisan sosial desa adat. Kepemangkuhan tidak lagi dipahami semata sebagai fungsi seremonial, melainkan sebagai institusi etika-spiritual yang berkontribusi pada keberlanjutan nilai-nilai Hindu di tengah dinamika perubahan sosial.

Secara teoretis, pengabdian ini menegaskan bahwa kepemangkuhan merupakan praktik etika-spiritual yang hidup (*lived ethics*), di mana ajaran normatif Hindu teraktualisasi melalui pengalaman, refleksi, dan tindakan sosial. Kontribusi ilmiah pengabdian ini terletak pada integrasi antara kajian normatif dan empiris, serta pada penegasan sesana kepemangkuhan sebagai fondasi pembentukan subjek moral dalam tradisi Hindu Bali. Secara praktis, hasil pengabdian ini merekomendasikan perlunya reorientasi pembinaan pemangku yang tidak hanya menekankan kompetensi ritual, tetapi juga penguatan kesadaran etis dan spiritual berbasis sesana dan swadharma.

Dengan demikian, penguatan sesana kepemangkuhan sebagai landasan swadharma pemangku Hindu menjadi strategi penting dalam menjaga kualitas kepemangkuhan, memperkuat kehidupan religius masyarakat, serta memastikan keberlanjutan tradisi Hindu yang bermakna, kontekstual, dan berorientasi pada nilai dharma.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwati, N. M. S. (2017). *Etika dan moralitas dalam ajaran Hindu*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Barker, C. (2012). *Cultural studies: Theory and practice* (4th ed.). London: SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Donder, I. K. (2012). *Teologi Hindu: Konsep dan praksis*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Eliade, M. (1959). *The sacred and the profane: The nature of religion* (W. R. Trask, Trans.). New York, NY: Harcourt, Brace & World.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. New York, NY: Basic Books.
- Giddens, A. (1984). *The constitution of society: Outline of the theory of structuration*. Cambridge: Polity Press.
- Hadiwijono, H. (1995). *Agama Hindu dan Buddha*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi* (Edisi revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Beverly Hills, CA: SAGE Publications.
- Pitana, I. G. (1994). *Dinamika masyarakat dan kebudayaan Bali*. Denpasar: Bali Post.
- Radhakrishnan, S. (1951). *Indian philosophy* (Vol. 1-2). London: George Allen & Unwin.
- Sudarsana, I. K. (2018). *Penguatan pendidikan karakter melalui pendidikan agama Hindu*. Denpasar: Jayapangus Press.
- Sutrisno, M. (2016). *Etika: Filsafat moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Triguna, I. B. G. Y. (2000). *Teori tentang simbol*. Denpasar: Widya Dharma.
- Triguna, I. B. G. Y. (2011). *Strategi Hindu*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Upanisad. (2008). *Upanisad-Upanisad utama* (Alih bahasa dan tafsir). Surabaya: Paramita.
- Wiana, I. K. (2004). *Makna upacara yadnya dalam agama Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Wiana, I. K. (2010). *Dharma, bhakti, dan karma dalam Hindu*. Denpasar: Pustaka Bali Post.